

ACEH PASCA PILKADA 2017 : Dari Populisme hingga Harapan Demokrasi Baru

Teuku Kemal Fasya

*Dewan Pakar Nahdlatul Ulama Aceh
dan Dewan Pakar Dewan Kesenian Aceh
(DKA).*



Abstract

This article analyzes the opportunities political change in Aceh post-local election 2017, which can be called a new phase towards the post-conflict democracy and tsunami transition. Simultaneous local election in 2017, either in provincial or districts/municipals in Aceh, are marked with massive defeat of Aceh Party (PA) in most areas. This reality shows that there is a decline of support from the ex-combatant's political forces in government politics. This article also sees the opportunity of the Irwandi Jusuf - Nova Iriansyah (IrNo), as the winner of governor election to be a new political hope in Aceh, replacing the political power that is attached to identity politics with the spirit of ethnonationalism, into a new local substantial democracy. However, this new government will also face the challenge of political involution which is the trap of populism; something that has been implicated in the government elected through a democratic process. One of the agenda of populism that could threaten substantial democracy is to harden the politics of Islamic discriminatory law against minority groups.

Key words: Partai Aceh (Aceh Party), Partai Nasional Aceh (Aceh National Party), MoU Helsinki Agreement, Simultaneous Aceh Local Election 2017, populism.

Prolog

Pilkada serentak tahap kedua, 15 Februari 2017 yang dilakukan se-Indonesia dan diikuti 101 daerah pemilihan telah melahirkan representasi politik lokal baru untuk tujuh provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Dari 101 daerah itu, Aceh menjadi kontestan terbanyak berpartisipasi, dengan 21 daerah pemilihan (16 pemilihan bupati, empat pemilihan walikota, dan satu pemilihan gubernur).

Sebelum pemilihan, ada keresahan pilkada di Aceh akan berlangsung rusuh. Ketakutan ini juga ditambah *warning* dari Bawaslu RI, bahwa Aceh menjadi salah satu dari empat provinsi yang memiliki Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) tertinggi selain Papua, Papua Barat, dan Banten. Kerawanan ini bisa terjadi karena faktor lemahnya integritas penyelenggara, gesekan antarpeserta pemilihan, dan juga partisipasi pemilih.¹

Hal ini bukan tanpa sebab. Pengalaman Pilkada 2012 sudah menunjukkan ada kerawanan yang tinggi, termasuk gagal tumbuhnya benih demokrasi partisipatif yang sehat melalui momen elektoral, sehingga praktik kekerasan masih terjadi. Pada Pilkada 2012 tercatat beberapa praktik kekerasan dan pembunuhan menimpa masyarakat sipil dan berlangsung sejak terjadinya polemik atas keputusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir

pasal 256 dalam UU Pemerintahan Aceh. Pasal itu membatasi keterlibatan calon independen ikut dalam pilkada hanya pada satu kali pelaksanaan, yaitu saat pilkada pertama 2006-2007 setelah UUPA disahkan.

Keputusan MK ini mendapatkan penolakan dari Partai Aceh (PA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) karena dianggap telah memangkas kekhususan Aceh dan menjadi preseden buruk dalam mengelola demokrasi lokal Aceh sesuai perdamaian MoU Helsinki.² Sejak saat itu PA melakukan upaya untuk menggagalkan peluang calon independen termasuk tidak memasukkan ke dalam rancangan qanun pilkada yang menggantikan Qanun No. 7/2006.

Akibatnya terjadi serentetan kekerasan yang dilakukan oleh orang tak dikenal (OTK) sejak 29 November 2011 hingga 5 Januari 2012 yang menyebabkan sembilan masyarakat sipil tewas dan belasan lainnya luka-luka.³ Kemudian hari diketahui bahwa kekerasan yang terjadi menjelang Pilkada 2012 memang bermotif politik. Saat itu tercatat ada 36 pelanggaran pilkada yang terjadi dan mengganggu keamanan dan kelancaran proses pilkada di Aceh.⁴

Pada Pilkada 2017, situasi *horor vacuui* tidak terjadi. Paling tidak kegawatan politik yang memengaruhi

1 "Tiga Unsur Ini Tentukan Indeks Kerawanan Pilkada", *www.tempo.co*, 22 Agustus 2016.

2 *Waspada*, 25 Januari 2011.

3 Laporan Teuku Kemal Fasya, "Rapid Assessment, "Krisis Pilkada Aceh dan Analisis Keberlanjutan Demokrasi dan Perdamaian", 12 Januari 2012, Kemitraan.

4 "Polri: 36 Kasus Pidana terjadi Selama Pilkada di Aceh", *detik.com*, 11 April 2012.

publik Aceh untuk berpartisipasi secara bebas tidak sangat terganggu. Memang masih terjadi tekanan politik, propaganda, dan politik mobilisasi, terutama di daerah-daerah pedesaan dan pelosok. Namun, secara keseluruhan Pilkada serentak 2017 berlangsung aman.⁵

Akhirnya Pilkada Gubernur Aceh seperti telah diketahui hasilnya dimenangkan oleh pasangan Irwandi Jusuf–Nova Iriansyah dengan perolehan 898.710 suara dari total suara sah 2.414.801 atau 37,2 persen. Pasangan ini didukung oleh Partai Demokrat, PKB, Partai Nasional Aceh (PNA), Partai Daulat Aceh (PDA), dan PDIP. Adapun Muzakkir Manaf – T.A. Khalid yang didukung oleh partai terbesar di parlemen Aceh, PA, dan didukung oleh Gerindra, PKS, PPP versi Djan Fariz, dan PAN menjadi memperoleh 766.427 suara atau 32,1 persen.

Empat pasangan lainnya yaitu Tarmizi Karim - T. Muchsalmina Ali yang didukung oleh Partai Nasdem, Golkar,

PPP versi Romahurmuziy, dan Hanura memperoleh 406.865 suara (16,8 persen); Zaini Abdullah-Nasaruddin yang merupakan pasangan gubernur petahana dan bupati Aceh Tengah memperoleh 167.910 suara (6,9 persen); Zakaria Saman-T. Alaidinsyah mendapatkan 132.981 suara (5,5 persen); dan pasangan Abdullah Puteh-Said Mustafa Usab mendapatkan suara terkecil 41.908 suara (1,7 persen).⁶ Tiga pasangan calon gubernur-wakil gubernur dengan suara terkecil maju melalui calon independen.⁷

Faktor-faktor Kemenangan Irwandi

Jika melakukan kilas balik kenapa Irwandi Jusuf bisa memenangi Pilkada 2017, ada beberapa faktor pendukung.

5 Saya sendiri diminta oleh Media Research Centre (MRC) untuk membantu dalam survei Pilkada Aceh, yang menjadi bagian dari survei independen tim riset Media Group di beberapa daerah yang terlibat Pilkada serentak 2017. Saat itu mahasiswa Antropologi dan Komunikasi FISIP Universitas Malikussaleh menjadi peserta survei yang berlangsung selama bulan November – Desember 2016. Dari pengakuan mahasiswa yang menjadi surveyor di lapangan terjadi tekanan untuk memilih calon yang berasal dari Partai Aceh. Bahkan ada tim surveyor di dua kecamatan Aceh Utara (Meurah Mulia dan Simpang Keramat) yang ditakut-takuti dengan senjata api. Gambaran ini memperlihatkan bahwa situasi keamanan dan otonomi pemilih di bagian terpencil dan menjadi basis eks kombatan seperti Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Pidie tidak cukup bebas dalam memilih calon-calon peserta pilkada.

6 “KIP Aceh Ketuk Palu untuk Kemenangan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah”, www.kompas.com, 25 Februari 2017. Hasil Pilkada ini memiliki beberapa anomali. Salah satunya suara calon independen yang sebelumnya “berhasil” mengumpulkan KTP minimal 153.045 sebagai syarat tiga persen, malah saat penghitungan suara menyusut jauh. Itu seperti yang dialami mantan Gubernur Aceh yang pernah menjadi terpidana korupsi, Abdullah Puteh. Kekalahan calon independen ini juga menjadi sinyal bahwa politik kepartaian masih cukup dominan dalam pilkada.

7 Seperti diketahui, beberapa regulasi pada pilkada di Aceh menggunakan peraturan khusus (*lex specialis*). Salah satunya adalah persyaratan pengumpulan KTP yaitu tiga persen dari total suara penduduk Aceh (Pasal 68 UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh). Di daerah lain KTP ditentukan rasionya berdasarkan daftar pemilih dan bukan penduduk.



Pertama, Irwandi Jusuf sendiri bukan orang baru dalam Gerakan Aceh Merdeka. Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala ini dikenal telah menjadi tokoh propaganda GAM - organisasi yang kemudian dinamakan Komite Peralihan Aceh (KPA) dan kini menjadi Partai Aceh. Ia memiliki nama samaran Teungku Agam. Ia bekerja dibalik layar dalam membuat rilis sejak era konflik pasca Orde Baru. Irwandi sempat ditahan pada masa Darurat Militer (19 Mei 2003 – 18 Mei 2005) dan melarikan diri ketika penjara tempat ia ditahan hancur ditimpa tsunami.⁸ Pada masa perdamaian Helsinki (15 Agustus 2005), ia menjabat

sebagai perwakilan senior GAM dalam tim AMM (Aceh Monitoring Mission).

Kedua, keterlibatannya pada masa-masa akhir konflik Aceh dan selama proses perdamaian Helsinki menjadikan Irwandi tokoh populer di kalangan GAM, terutama dari kalangan muda. Sebenarnya pada tahun 2006 sempat terjadi konvensi di kalangan elite GAM seluruh dunia di Aceh untuk memilih siapa yang paling berhak untuk menjadi gubernur pada masa pasca konflik itu.

Pada pertemuan yang dinamakan Duek Pakat Bansa Aceh Ban Sigom Donja (Musyawarah Mufakat Bangsa Aceh Seluruh Dunia) di Gedung Dayan Dawood, Universitas Syah Kuala, Banda Aceh pada 20-21 Mei 2006, nama Irwandi tidak terpilih sebagai pilihan terbanyak. Forum itu memilih Tgk. Nashiruddin bin Ahmed yang dipasangkan dengan Muhammad Nazar untuk menjadi wakil

8 ISAI Aceh Research Group, "Pemilihan Kepala Daerah di Aceh" dalam Olle Tornquist et al, *Aceh : Peran Demokrasi bagi Perdamaian dan Rekonstruksi*, Yogyakarta : PCD Press, 2011., hlm. 357.

gubernur. Pasangan ini dianggap lebih tepat membawa visi dan misi GAM dalam menjalankan pemerintahan dalam konsep otonomi khusus (*self-government*) menurut bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹ Namun saat itu Tgk. Nashiruddin tidak bersedia maju, sehingga akhirnya pilihan jatuh kepada Irwandi.

Pilkada pertama yang berlangsung di Aceh itu akhirnya menjadi momentum keterpecahan GAM pertama pasca-damai.¹⁰ Kelompok “GAM tua” saat itu tidak begitu *sreg* dengan pilihan berdasarkan hasil pertemuan di Banda Aceh. Akhirnya kelompok GAM tua – atau tokoh-tokoh GAM eksil yang tinggal di luar negeri seperti Swedia, Denmark, dan Singapore, dan didukung Panglima Muzakkir Manaf memilih mencalonkan Humam Hamid dan Hasbi Abdullah untuk maju dalam Pilkada. Sempat terjadi penolakan pasangan ini maju atas nama KPA, karena yang menjadi calon gubernur bukan dari kader GAM. Akhirnya pasangan ini didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun kelompok “GAM muda” dan Partai SIRA memilih Irwandi Jusuf dan Muhammad Nazar untuk maju pada Pilkada. GAM muda lebih leluasa menggunakan kenderaan KPA untuk melakukan politik mobilisasi, meskipun ketua KPA mendukung pasangan Humam – Hasbi. Sejarah akhirnya mencatat, pasangan Irwandi – Nazar memenangi pilkada dengan 38,2 persen suara mengungguli pasangan Humam – Hasbi dengan 16,6 persen suara. Pilkada Aceh pada masa itu diikuti oleh delapan pasangan.¹¹

Ketiga, meskipun tidak dapat dikatakan sukses, pemerintahan Irwandi – Nazar saat itu mampu memunculkan dua agenda populis yang menjadi kenang-kenangan selama memerintah, yaitu Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dan beasiswa bagi anak yatim. Isu ini ternyata cukup laku dijual pada kampanye lalu. Bahkan dua pasangan petahana kehilangan kredibilitasnya ketika akan melawan *branding* Irwandi Jusuf.¹²

Keempat, kemenangan Irwandi – Nova sendiri bukan semata faktor kehebatan mereka dalam berkampanye dan menyusun visi-misi. Bahkan sesungguhnya yang menyusun visi-misi adalah tim *think-tank*. Irwandi dan Nova hanya mengartikulasikannya ke depan publik saat debat kandidat calon

9 Taufik Al Mubarak, “Pilkada Aceh 2017 : Kembalinya Propagandis GAM ke Singgasana”, *tirto.co*, 23 Februari 2017.

10 Sebenarnya keterpecahan GAM sudah terjadi pada tahun 1984, ketika Dokter Zaini Abdullah, Teuku Sarong, dan Daud Paneuk berbeda dengan dokter Husaini Hasan. Mereka mengangap dokter Husaini Hasan terlalu mendikte Hasan Tiro sebagai “kepala negara” Gerakan Aceh Merdeka. Keterpecahan itu menyebabkan Husaini Hasan tersingkir dari lingkaran utama GAM dan kemudian membangun faksi tersendiri dalam GAM, yang oleh lawan politiknya dinamakan Majelis Penyelamatan GAM atau MP-GAM. Husaini M. Hasan, *Dari Rimba Aceh ke Stockholm*, Jakarta : Batavia Publishing, 2015. hlm. 329 – 338.

11 Tornquist, *op cit*, hlm. 360.

12 Wawancara dengan Lukman Age (sekretaris Badan Kajian Strategis Pemenangan Irwandi – Nova), 24 September 2017.

gubernur-wakil gubernur atau pada masa kampanye terbuka.¹³ Jika dilihat dari keterampilan membangun gagasan perubahan, Abdullah Puteh terlihat lebih *firm* saat acara Debat Kandidat Calon Gubernur-wakil gubernur Aceh pada 22 Desember 2016. Para calon lain lebih banyak beretorika dan memainkan dramaturgi panggung.¹⁴ Tidak tampak kemampuan secara artikulatif dan secara konklusif memberikan kedalaman atas teks tertulis. Bahkan kemampuan wicara Irwandi masih kalah dibandingkan Tarmizi Karim dan Abdullah Puteh.

Namun Irwandi diuntungkan dengan defisit kepercayaan dan buruknya citra politik pasangan petahana, yang dalam pilkada kali ini juga bersimpangan jalan. Belum lagi keterpecahan eks kombatan seperti majunya Zakaria Saman dan Zaini Abdullah sebagai calon gubernur yang memiliki basis suara di Pidie dan Pidie Jaya, ikut menambah kesuksesan Irwandi mendulang suara. Suara dari kalangan eks kombatan terpecah-belah.

Sebagai contoh, pemilih bagian tengah Aceh yang beretnis mayoritas Gayo dan Alas memilih Irwandi – Nova dengan suara meyakinkan. Dari enam calon berkontestasi pada Pilkada Aceh 2017, Irwandi berhasil mendulang 41,7

persen di Bener Meriah, 57,4 persen di Aceh Tengah, 40,59 persen di Gayo Lues, dan 41,9 di Aceh Tenggara.¹⁵ Padahal diketahui, Bupati Aceh Tengah juga maju pada Pilgub Aceh, berpasangan dengan Zaini Abdullah. Namun, ia tidak sukses di tanah kelahirannya sendiri.

Terakhir, Pilkada 2017 menjadi pilkada dengan indeks kecurangan dan kegawatan minimal pada hari pemungutan suara. Hal ini tak terlepas dari semakin baiknya teknologi rekapitulasi dan semakin sedikit ruang berakrobat untuk kecurangan. Salah satunya karena kesiapan aparat keamanan yang memiliki tugas ganda. Disamping melakukan pemantauan dan pengamanan di setiap TPS, mereka juga diberi tugas tambahan yaitu mendokumentasikan rekapitulasi hasil pemungutan suara di setiap TPS. Hasil rekapitulasi formulir C1 langsung diunggah ke sistem mereka sendiri, sehingga ketika terjadi penyimpangan akan ketahuan karena ada data pembandingan dari kalangan aparat keamanan.¹⁶

Harapan Politik Yang Mengempis

Namun ekspektasi publik atas pemerintahan Irwandi– Nova yang dilantik pada 5 Juli 2017 dan ketika tulisan ini dibuat baru berumur 100 hari, mulai menun-

13 Seperti disampaikan oleh Tarmizi (manajer Saksi dan Pengawasan Suara Tim Irwandi – Nova), 22 Februari 2017. Hal ini juga konfirmasi oleh Lukman Age sebagai sekretaris Badan Kajian Strategis Pemenangan Irwandi – Nova.

14 Teuku Kemal Fasya, “Debat tanpa Hati dan Kedalaman Pikir”, *Serambi Indonesia*, 27 Desember 2016.

15 *Serambi Indonesia*, 24 Februari 2017.

16 Seperti disampaikan oleh komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara kepada penulis pada 22 Februari 2017. Jadi tugas KIP Aceh dan kabupaten/kota semakin ringan menghadapi tekanan-tekanan politik pasca-pemungutan suara.

jukkan harapan mengempis.

Pelantikan mereka turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo yang transit di Aceh sebelum lawatannya keluar negeri. Awalnya kegembiraan membuncah. Mereka dianggap menjadi harapan baru yang bisa memutus mata rantai transisi politik di Aceh menuju demokrasi yang semakin terkonsolidasi. Namun, kini fenomena politik mulai memperlihatkan tanda-tanda mencemaskan. Jika merujuk konsep yang pernah disitir Olle Tornquist, pemikir politik asal Oslo University, hal itu disebabkan tidak ada lompatan yang bisa dilakukan di masa perdamaian untuk menghidupkan demokrasi ala Aceh. Sebaliknya yang hidup upaya mereplikasi pola politik elitis nasional dalam mengelola politik dan ekonomi.¹⁷

Hal lain yang terlihat adalah pemerintahan Irwandi – Nova “tidak lebih revolusioner” dibandingkan pemerintahan Zaini – Muzakkir – dalam memunculkan gagasan dan performa politik di ruang politik pada seratus hari pertama. Yang muncul malah berkompromi dengan pemerintahan lama yang terbukti gagal melakukan percepatan demokrasi khas Aceh. Itu terlihat pada pernyataan Irwandi yang tidak akan mengganti kabinet Zaini Abdullah – padahal kabinet sebelumnya dibentuk sebagian besar berdasarkan politik nepotisme dan oligarki.¹⁸

17 Tornquist, *op cit.*, hlm. 9.

18 “Irwandi Janji tak Rombak SKPA Abu Doto”, *Serambi Indonesia*, 21 Juni 2017. Tentang buruknya pemerintahan Zaini Abdullah yang terkenal sangat sering

Irwandi dilihat tidak berada pada kesepakatan yang sama dengan publik terkait permasalahan krusial yang muncul di Aceh. Ada sikap pragmatis dalam wacana yang disampaikan di masa tunggu sebelum dilantik menjadi gubernur definitif. Salah satunya karena lamanya waktu ambil alih kekuasaan, dari sejak diputuskan sebagai pemenang Pilkada 15 Februari 2017 (ditetapkan pada 24 Februari 2017) dengan masa pelantikan yaitu 5 Juli 2017 atau hampir lima bulan.

Namun yang jelas dalam konteks ini, Irwandi tidak memilih melakukan penataan institusi (*institution first*) dan pendekatan transformatif, sebaliknya melakukan hal-hal yang bisa mengarah kepada “normalisasi politik Aceh” seperti yang terjadi pada lima-sepuluh tahun terakhir. Yang terlihat – seperti diistilahkan Tornquist – tradisi pemerintahan autokratik– khas gerilyawan – yang kurang sensitif pada keinginan dan harapan publik pada demokrasi menggantikan fenomena konflik kekerasan.¹⁹ Jadi secara ringkas, imajinasi “*state building*” yang progresif

menggonta-ganti tim SKPA (Satuan Kerja Perangkat Aceh) itu menjadi salah satu penyebab banyak program pembangunan tidak berjalan. Bahkan tercatat sejak menjabat pada 2012, Zaini Abdullah sudah mengganti lebih 10 kali pejabat setingkat eselon II. Yang paling kontroversial adalah penggantian menjelang berakhirnya masa jabatannya pada 10 Maret 2017, atau setelah hasil pilkada telah diketahui publik pada akhir Februari 2017 (“Gubernur Aceh Tiba-tiba Ganti Pejabat Daerah, 17 Kepala Dinas Melawan”, *kompas.com*, 12 Maret 2017). Masalahnya, Irwandi tidak bersikap kritis atas pandangan publik atas isu ini dan memilih berkompromi di belakang meja.

19 Tornquist, *op cit.*, hlm. 23.

ala aktivis dan intelektual yang ingin diwujudkan pasca-perdamaian Aceh tidak muncul.

Ini menjadi pertanyaan serius terkait ide demokrasi khas Aceh. Jika merujuk pada gagasan Partha Chatterjee, teoretikus politik dan sejarawan poskolonial India, kekuatan gagasan demokrasi dan kedaulatan nasional yang hidup di Eropa dan Amerika sejak abad 19 belum menjadi fenomena di dunia non-Barat. Meskipun pengaruh revolusi Perancis menyebar bak virus pada abad 18 di Barat, sesungguhnya praktik perluasan gagasan demokrasi di Timur, seperti yang dilakukan oleh Napoleon ke Mesir pada 1798 belum sepenuhnya sukses. Hal ini karena gagasan itu dibawa melalui proses kolonialisme Eropa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.²⁰

Gagasan demokrasi dari Barat kerap menjadi konsep ambigu di tanah jajahan, karena sejarah demokrasi itu berasal dari kurun yang relatif homogen di Barat, tapi di belahan dunia lain mengalami perjalanan sejarah (*historical voyage*) yang heterogen. Bagi dunia non-Barat, kekuasaan yang diperoleh penguasa masih diinspirasi oleh dogma agama, sukse dinasti, atau penaklukan, dan bukan kehendak rakyat, meskipun mengklaim membawa semangat demokrasi.²¹

Meskipun demikian, situasi itu tidak seragam terjadi di seluruh dunia non-Barat. Di beberapa wilayah seperti Karibia dan Haiti, ide demokrasi mampu menghentikan perbudakan dan pemimpin revolusi mampu menghentikan kekuasaan menindas. Namun, ide demokrasi belum bisa tumbuh subur di Mesir dan di Asia.²²

Situasi ini yang kemudian terlihat di Aceh. Meskipun banyak pengamat melihat ide perdamaian ala Skandinavia itu cocok dipraktikkan di Aceh, secara umum lebih banyak hambatan kultural dan struktural dalam mengaplikasikan benih perdamaian dan demokrasi ala Eropa Utara itu. Hal itu karena masih hidupnya politik karismatisme dan pola politik mobilisasi dibandingkan manajemen politik yang rasional dan didasarkan pada gagasan intelektualisme. Hal itu paling tidak dirasakan oleh partai-partai lokal di Aceh. Anak muda belum menjadi lingkaran utama partai politik besar.²³

Fenomena ini bisa dipahami karena gerakan eks kombatan ini tidak pernah berada di jalur kaum pemimpin (*the rulers*). Sekian lama kaum “pemberontak” ini berada di luar negeri

banyak berdemokrasi karena masih belum stabilnya pemerintahan di sana menghadapi faksi-faksi politik yang bertikai. Sisi kerumitan rekonsiliasi dan keterlupaan korban konflik di Timor Leste bisa dibaca pada Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR), *Chega! Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste*, Jakarta : KPG, 2010.

22 Chatterjee, *op cit.*, hlm. 28.

23 Wawancara dengan Lukman, bendara Partai Nasional Aceh (PNA), 24 September 2017.

20 Partha Chatterjee, *The Politics of the Governed: Reflections on Popular Politics in Most of the World*, New York : Columbia University Press., hlm. 27.

21 Yang paling fenomena adalah Negara Demokratik Kongo, yang ternyata secara intrinsik bukan negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Seperti juga Negara Republik Timor Leste yang masih harus belajar

dan tidak memiliki keterampilan apapun dalam manajemen pemerintahan kecuali manajemen imajiner yang diciptakan tentang sistem kekuasaan.

Meskipun sebutan Zaini Abdullah sebagai menteri kesehatan, Zakaria Saman sebagai menteri pertahanan, Malik Mahmud sebagai perdana menteri GAM, dan Teuku Hasan Tiro sebagai wali negara Aceh Merdeka, itu tidak pernah dipraktikkan dengan instrumen kekuasaan politik yang konkret. Sementara yang menjadi panglima militer GAM di lapangan seperti Muzakkir Manaf, Sofyan Daoed, Darwis Jeunib, dll adalah para pekerja dan bukan pemikir. Mereka dilatih *survive* di situasi perang dan mendapat pendidikan militer di Libya.²⁴ Namun mereka tidak terbiasa mengemukakan pendapat di depan publik. Disamping itu, karakter kepemimpinan militer mereka dibentuk oleh alam dan bukan melalui organisasi kemiliteran yang ketat dan terstruktur rapi.

Jadi dapat dipahami, ketiadaan pengalaman pemerintahan ini menyebabkan energi kepemimpinan dan manajemen pemerintahan tidak pernah dimiliki oleh kelompok GAM. Mereka memang tidak dipersiapkan untuk mengambil posisi pemerintah, tapi hidup dengan memunculkan

gerakan “anti-etatisme”: menolak konsep “pemerintahan Indonesia-Jawa” dengan segala instrumen hukumnya, dan tidak siap bersinergi. Menggunakan istilah Michel Foucault kelompok GAM “tidak memiliki daya pemerintahan (*governmentality*) dalam sistem negara modern”.²⁵ Daya pemerintahan yang dimaksud ialah perilaku untuk bisa bergerak dari sekedar memerintah diri sendiri (*governing the self*) menuju memerintah orang lain (*governing the other*).

Jadi tepat menganalogikan gagasan Chatterjee, bahwa eks kombatan ini sesungguhnya hanya menjalankan “politik sebagai orang yang pernah diperintah” (*the politic of the governed*). Mereka sesungguhnya masih asing dengan sistem politik pemerintahan. Mereka hidup pada situasi “teori patron-klien dan terimpit di antara faksi-faksi yang bertikai.”²⁶

Itu yang terlihat dari keterpecahan dan faksi-faksi yang semakin banyak muncul di kalangan eks GAM setelah perdamaian, termasuk pisah jalan antara Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf sebagai duet gubernur dan wakil gubernur. Sebelumnya faksi Irwandi Jusuf juga memisahkan diri dari PA dan membentuk Partai Nasional Aceh (PNA). Titik perpecahan semakin mengular ketika tokoh karismatis GAM, Teuku Hasan Tiro, me-

24 Kisah ini dituliskan oleh Murizal Hamzah dalam bukunya, tentang ada 800-900 pemuda Aceh yang mendapatkan pendidikan militer di Libya. Program ini ikut didukung oleh Pemimpin Libya Moammar Khadafi. Lihat Murizal Hamzah, *Hasan Tiro : Jalan Panjang Menuju Damai Aceh*, Banda Aceh : Bandar Publishing, 2014, hlm. 551.

25 Thomas Lemke, “Foucault, Governmentality, and Critique”, makalah dipresentasikan pada *the Rethinking Marxism Conference*, University of Amherst (MA), 21-24 September 2000., hlm. 2.

26 Chatterjee, *op cit.*, hlm. 55.

ninggal dunia 3 Juni 2010.²⁷

Gayo dan Empati pada Minoritas

Sebagaimana diketahui, wakil Irwandi Jusuf, Nova Iriansyah beretnis Gayo. Gayo adalah etnis minoritas terbesar yang berada di wilayah bagian tengah Aceh. Mereka memiliki karakter, sejarah, dan kultur politik berbeda dengan Aceh pesisir.

Salah satu yang cukup tipikal ialah wilayah Gayo tidak mengenal stratifikasi kebangsawanan. Masyarakat Gayo tak dibentuk oleh kultur feodal sehingga bisa digerakkan oleh satu sosok kharismatik. Konstruksi ini membuat kehidupan

27

Catatan obituari tentang Hasan Tiro ini sempat penulis publikasi di dua media 1) "Hasan di Tiro and the Price of Freedom for Aceh", *The Jakarta Post*, 11 Juni 2010 dan "Mengenang Hasan Tiro", *Koran Sindo*, 5 Juni 2010. Dalam tulisan itu terlihat sisi rapuh Hasan Tiro mengelola gerakan revolusioner ini. Salah satunya adalah ketidakmampuannya meyakinkan anaknya sendiri, Karim dari istrinya Dora, perempuan Amerika Serikat berdarah Yahudi, untuk ikut membesarkan gerakan ini. Ketika Hasan Tiro mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka 4 Desember 1976, umur Karim baru enam tahun dan ia akhirnya lebih dekat dengan ibunya dibandingkan ayahnya. Ia akhirnya merintis karir akademik di Xavier University sebagai dosen sejarah Amerika abad 16-17. Di sisi lain, kekerasan hati Hasan Tiro juga melunak dan memilih untuk berdamai ketika melihat Aceh hancur oleh tsunami 26 Desember 2004. Dalam perdamaian di Helsinki yang diinisiasi oleh Crisis Management Initiative (CMI) dan dipimpin mantan presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, kendali utama politik GAM berada di tangan Malik Mahmud. Ditengarai sebenarnya Hasan Tiro sudah mulai turun kesadarannya dan mengidap kepikunan, dampak dari stroke. Malik Mahmud, sosok misterius yang tidak banyak dikenal kiprahnya sebelum menjadi tokoh terpenting GAM setelah Hasan Tiro, lebih menentukan perjalanan politik GAM termasuk PA saat ini. Banyak kelompok berseberangan dengannya diputus jaringannya dengan Hasan Tiro. Salah satunya adalah Nur Djuli, seorang negosiator GAM saat perdamaian Helsinki. Wawancara dengan Shadia Marhaban, 27 September 2017.

masyarakat Gayo cukup egaliter. Di Gayo, tak ada perbedaan penampilan antara raja dan rakyat jelata. Raja dan rakyat biasa tinggal di bangunan rumah yang sama, *umah pitu ruang*.²⁸ Hal itu juga dibentuk oleh sejarah pembentukan masyarakat modern di Sumatera, yang dari penelitian arkeologis menunjukkan Gayo sebagai manusia tertua di Sumatera, yang telah membentuk komunitas sejak 8 ribu tahun yang lalu. Selama ini ada mitos bahwa masyarakat Bataklah sebagai etnis dianggap tertua.²⁹

Hal ini berbeda misalnya masyarakat Aceh pesisir yang mengenal struktur *politico-cultural* seperti kaum *uleebalang*, kesultanan, dan struktur adat feodalistik lainnya. Di samping struktur kebangsawanan, ada stratifikasi politik yang terbentuk pasca reformasi, misalnya penyebutan kelompok kombatan GAM sebagai "pejuang nanggroe". Meskipun cukup memiliki karakter budaya dan antropolinguistik berbeda, sejak dulu etnis Aceh dan Gayo sudah membangun hubungan sosial-ekonomi. Penyebabnya, jalan penghubung Gayo ke dunia luar juga harus melalui pesisir timur disamping jalan menembus dari wilayah Alas hingga ke Sumatera Utara.³⁰

Namun sejak pascareformasi, ketika kekuatan GAM menonjol

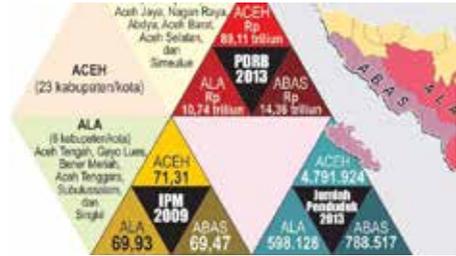
28 Wawancara dengan Win Wan Nur, tokoh pemuda Aceh perantauan, tinggal di Bali, 22 September 2017.

29 Teuku Kemal Fasya, "Sesat Pikir Mante", *Kompas*, 13 Mei 2017.

30 Gambaran lengkap tentang catatan etnografis Gayo yang ditulis pertama sekali adalah oleh antropolog Belanda Christian Snouck Hurgronje. Lihat Snouck Hurgronje, *Tanah Gayo dan Penduduknya*, Jakarta : INIS, 1996.

ke dalam ruang publik, relasi yang bersifat simbiosis-mutualisme antara masyarakat Aceh dan Gayo tiba-tiba merenggang. Salah satu penyebabnya ialah daerah Gayo tidak terdampak Daerah Operasi Militer (DOM). Itulah sebab dari gayo tidak banyak “bibit-bibit GAM” seperti daerah pesisir timur dan sebagian di pesisir Barat. Daerah Gayo dan pedalaman tengah di Aceh dikenal sebagai basis Golkar dan pendukung pemerintah Orde Baru.³¹

Itulah yang kemudian membentuk pandangan *stereotype* tentang Aceh dan Gayo. Masyarakat Aceh – terutama yang tertindas di era masa pemberlakuan militer - mengaku sebagai “bangsa pejuang”, sedangkan masyarakat Gayo dituduh sebagai “biek Jawa”, keturunan Jawa.³² Beberapa regulasi dalam UU Pemerintahan Aceh (UU No. 11 tahun 2006) juga menyebutkan persyaratan yang mengistimewakan etnis Aceh seperti pencalonan Wali Nanggroe yang menguntungkan masyarakat etnis Aceh terutama dari kalangan eks GAM.³³



Citra yang memburuk dalam pengelolaan multikulturalisme di Aceh pascaperdamaian ini akhirnya membangun relasi yang serba curiga, antara masyarakat Gayo dan masyarakat pesisir. Pelbagai stigma akhirnya muncul. Salah satunya menyebutkan masyarakat Gayo kurang islami dan lebih mementingkan adat dibandingkan agama.

Pandangan ini sepenuhnya keliru dari aspek antropologis. Daerah Gayo yang sejak era kolonial Belanda memang telah dimasukkan sebagai rumpun etnik dan adat yang berbeda dengan Aceh. Ia bukan subordinasi dari budaya dan adat Aceh pesisir.

Demikian pula dklasifikasi adat (*adatrecht*) yang disusun Van

31 Jika di daerah pesisir timur terbentuk kelompok GAM, yang secara sosio-antropologis dilihat sebagai korban-korban konflik operasi militer, sebaliknya di wilayah tengah menjadi tempat bersemainya kelompok “pro tanah air”, yaitu pembentukan PeTA (Pembela Tanah Air). PeTA adalah barisan milisi sipil untuk menghalau masuknya pengaruh GAM di tanah Gayo dan Alas. Makanya ketegangan terus terjadi antara tokoh-tokoh PA dan PeTA dalam setiap momentum elektoral. Pada pemilu legislatif 2014 ketika rombongan simpatisan PA masuk ke wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah, sempat terjadi ketegangan di antara mereka sehingga bentrok fisik dan perusakan properti tak terhindarkan. “Masa Peta dan Partai Aceh Saling Serang”, *sinarharapan.co*, 20 Maret 2014.

32 Wawancara dengan Win Wan Nur, 22 September 2017.

33 Bahkan ketika pelantikan Malik Mahmud sebagai

Wali Nanggroe kesembilan pada 19 September 2013, masyarakat Gayo di sejumlah tempat melakukan demonstrasi menolak kelembagaan “politik-feodalistik” itu. Ungkapan yang disampaikan demonstran bahwa Qanun Wali Nanggroe No. 8 tahun 2012 wujud rasisme untuk Aceh yang multietnis dan budaya. Mereka bahkan membentangkan pelbagai spanduk yang menyebutkan QWN adalah peluang menuju separatisme di bawah NKRI. Lihat “Massa Gayo Tolak Qanun Lembaga Wali Nanggroe”, *tribunenews.com*, 20 September 2013. Salah satu aspek “diskriminatif” yang terlihat di dalam Qanun itu adalah penggunaan istilah etnis Aceh, termasuk persyaratan harus bisa berbahasa Aceh, yang berarti bahasa etnis Aceh.

Vollenhoven, Gayo merupakan satu dari 19 wilayah adat *mainstream* di Nusantara yang memiliki konstruksi otonom dan tidak bisa direpresentasikan ke dalam etnis lain. Pembentukan kebudayaan dan adat Gayo secara komprehensif berasal dari nilai dan norma keislaman, meskipun terjadi beberapa keunikan misalnya dalam melihat konteks pernikahan, perceraian, dan pembagian waris.³⁴ Kebudayaan Gayo lebih dialektik menjadikan Islam sebagai inti perumusan nilai dan norma, tapi tidak menjadikannya secara normatif-formal. Lokalitas Gayo memiliki ruang definisi yang solid.

Mereka juga menghadapi tantangan ketika menjadi bagian dari Indonesia; sebuah konsep *nation* baru yang memiliki daya paksa atas hukum nasional, termasuk ide-ide baru tentang persamaan, mobilitas, dan konsep adat yang disebut “perintah agama”.³⁵ Jadi adat (*ädät*) dalam pemahaman Gayo juga berasal dari norma dan moral Islam, meskipun tidak diabsorpsi secara skriptual. Adat berasal sumber-sumber moral masyarakat Gayo masa lalu.³⁶

Atas dasar itulah, kemenangan Irwandi – Nova bisa disebut sebagai “berkah tersembunyi” terkait upaya

merekatkan Aceh dalam bingkai multikulturalisme. Terlebih lagi sejak menguatnya gagasan pemekaran provinsi Aceh Leuseur Antara (ALA) dan ABAS (Aceh Barat Selatan), yang bermuara pada masalah kesejahteraan dan ketertinggalan pembangunan di pedalaman tengah Aceh dan pesisir barat-selatan. Titik tegang juga terjadi karena perasaan terdiskriminasi oleh etnis Aceh akibat pola politik pasca perdamaian yang menguntungkan PA sebagai “representasi politik pesisir timur”.

Dalam konteks pilkada, Irwandi bukan memilih Nova Iriansyah, tapi Nova lah yang memilih Irwandi. Sebagai ketua partai pengusung yang memiliki elektoral terbesar di antara partai pengusung lainnya (Partai Demokrat), Nova memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan kader-kader PD lainnya. Tentu saja, sebagai partai dengan kursi terbanyak di DPRA (8 kursi), PD bisa bermanuver lebih dominan untuk menentukan posisi calon wakil gubernur berpasangan dengan Irwandi dibandingkan PNA (3 kursi), PKB (1 kursi), dan Partai Daulat Umat/PDA (1 kursi).

Memilih Irwandi sebagai calon gubernur saat itu adalah pilihan ideal. Pelbagai survei yang dilakukan menjelang pendaftaran calon gubernur menempatkan Irwandi paling tinggi elektabilitasnya. Dalam survei internal yang dilakukan PD, Irwandi menjadi calon gubernur yang paling diinginkan (35,7 persen) dibandingkan kandidat

34 John W. Bowen, *Islam, Law, dan Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*, Cambridge : Cambridge University Press, 2003., hlm. 6.

35 *Ibid.*, hlm. 22. Yang dimaksud dengan perintah agama (*religious command*) di atas adalah pola imperatif nilai-nilai puritan agama, yang biasa digerakkan oleh kelompok yang intoleran dengan kebudayaan lokal. Akhirnya ketika nilai-nilai agama itu bertemu dengan dinamika lokal, konteks lokal terlihat serba salah dan kurang.

36 *Ibid.*, hlm. 29.

lainnya yang memiliki angka 17 persen, 11 persen, dan 3,8 persen.³⁷

Apakah Nova menjadi faktor terkumpulnya suara masyarakat Gayo dan Alas pada Pilkada 2017? Ternyata bukan. Faktor Irwandi lebih kuat menjadi preferensi elektoral dibandingkan Nova. Irwandi telah memiliki nama harum di masyarakat Gayo dan Alas, terutama berkat keberhasilan program JKA-nya pada fase pertama pemerintahan (2007-2012). Masyarakat Gayo sangat merasa manfaat program asuransi kesehatan yang dirancang pemerintah Aceh yang kemudian diduplikasi sebagai program BPJS secara nasional. Bahkan saat itu program JKA itu digratiskan bagi seluruh penduduk Aceh yang tidak terkover oleh program asuransi pemerintah dan berbayar lainnya.

Nova bukanlah faktor yang mendominasi elektoral masyarakat Gayo dan Alas. Mungkin jika dilihat, faktor pendukung Nova terletak pada memorialisasi sebagai putera mantan

Bupati Aceh Tengah pada era 1970-1974, H.M. Nurdin Sufie, yang memiliki nama baik pada masa pemerintahannya.³⁸ Bahkan sebelum pilkada, banyak masyarakat tidak mengenal Nova karena ia tidak lahir dan besar di Tanah Gayo. Rekan-rekannya semasa sekolahlah (ia sempat mengecap pendidikan SD beberapa tahun di Takengon) yang turun tangan untuk meyakinkan orang-orang bahwa ia memang Gayo.³⁹

Meskipun demikian, kemenangan Irwandi – Nova ini bisa menjadi jalan untuk menyembuhkan relasi antar etnis di Provinsi Aceh yang memiliki sembilan etnik tempatan (*host ethnics*).⁴⁰ Titik berangkatnya adalah politik empati kepada Gayo, sebagai wujud penghargaan kepada etnis-etnis minoritas di Aceh yang belum memiliki ruang akses dan kekuatan politik setara dengan etnis Aceh. Dari seluruh sejarah gubernur Aceh, tidak ada yang berasal dari etnis minoritas. Etnis Aceh yang pernah menjadi gubernur didominasi dari wilayah Aceh Rayeuk (Aceh Besar), Pidie, Pasee (Aceh Utara dan Bireun), dan Peureulak (Aceh Timur). Empati

37 "Ini Alasan Akhirnya Demokrat Resmi Usung Irwandi Yusuf di Pilkada Aceh 2017", *Aceh Trend*, 5 Agustus 2016. Hasil survei MRC pada bulan Desember 2016 juga menempatkan Irwandi Jusuf - Nova Iriansyah dengan elektabilitas tertinggi dengan 33,9 persen. Di urutan kedua Muzakkir Manaf – TA Khalid dengan 26,6 persen dan Tarmizi Karim – Machsalmina di urutan ketiga dengan 18,2 persen. Hasil survei telah difinalisasi pada pertengahan Januari 2017. Sayangnya, MRC tidak mempublikasi secara terbuka. Penulis mendapatkan hasil ini dari pengelola survei tanpa publikasi (*off the record*). Hasil survei MRC menjadi semakin meyakinkan karena dilakukan setelah ada penetapan calon gubernur dan wakil gubernur oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Data survei MRC penulis tuliskan di *Harian Serambi Indonesia*, "Pilkada Aceh dan Harapan Perubahan", 23 Februari 2017. Sebenarnya Nasdem juga membuat survei internal tapi tidak pernah dibuka ke publik. Dari yang penulis dengar, hasil tertinggi juga menyebut nama Irwandi.

38 Wawancara dengan Sri Wahyuni, aktivis perempuan Bener Meriah, 17 September 2017.

39 Wawancara dengan Win Wan Nur, 22 September 2017.

40 Etnis tempatan yang kini terdata di Aceh adalah 1) Aceh, 2) Gayo, 3) Alas, 4) Tamiang, 5) Aneuk Jamee 6) Kluet, 7) Singkil, 8) Simeulue, dan 9) Haloban; etnis terkecil yang sebelumnya dianggap etnis Singkil dan tinggal di Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil. Untuk penjelasan ini lihat tulisan penulis "Identitas Terbelah Singkil dan Ambiguitas Toleransi", dalam Ahmad Suaedy (ed), *Intoleransi, Revitalisasi Tradisi, dan Tantangan Kebinekaan Indonesia*, Depok : Abdurrahman Wahid Centre – Universitas Indonesia (AWC-UI), 2017.

dan kebijakan kepada etnis minoritas menjadi indikator bahwa demokrasi substansial mulai dijalankan, bukan sekedar retorika.

Tantangan dan Ancaman Populisme

Ada satu fenomena visual unik ketika pelantikan Irwandi– Nova. Beberapa hari sebelum pelantikan mereka, ada sesi foto dengan menggunakan Pakaian Dinas Upacara Bendera (PDUB). Ketika itu mereka membuat gaya foto dengan melipat dan menekuk satu kaki. Gaya itu tiba-tiba menjadi viral dan bagian hiburan politik pascapilkada. Gaya itu dalam bahasa Aceh sebut “*mensinklet kaki*” (menyerongkan kaki).⁴¹

Gaya itu tiba-tiba bertemu dengan beberapa gaya pemimpin kabupaten/kota yang juga terpilih pada pilkada serentak itu. Dua hari setelah Irwandi dilantik sebagai gubernur pada 5 Juli 2017, walikota Banda Aceh, Aminullah, dilantik oleh Irwandi. Saat upacara sidang pelantikan, tersebar foto Aminullah tergantung kakinya karena sosoknya yang pendek dan kursi yang terlalu tinggi. Di media sosial foto itu diperbincangkan dengan suasana humor.

Kembali pada 10 Juli 2017 terjadi fenomena unik, yaitu pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar. Saat itu diketahui wakil bupati Aceh Besar Tgk. H. Husaini Abdul Wahab adalah seorang ulama berpengaruh di Aceh Besar. Ia juga pengurus HUDA (Himpunan Ulama

Dayah Aceh). Sebagai ulama ia tentu tak terbiasa dengan celana panjang dalam pakaian sipil PDUB.

Tidak seperti pejabat lainnya, ia membuat kombinasi dengan menggunakan sarung sebagai pengganti celana, dengan warna yang sama dengan setelan jas. Ia pun tidak menggunakan dasi. Jadilah pemandangan ini ramai di kalangan netizen dan wartawan, sehingga akhirnya ketiga gaya pejabat itu menjadi viral.

Gaya Walikota Banda Aceh dan Wakil Bupati Aceh Besar memang sebuah kebetulan. Mereka juga tidak melanjutkan aksi itu selanjutnya. Namun Irwandi Jusuf melakukan itu beberapa kali sehingga muncul sikap bahwa hal itu terlalu artifisial untuk dipamerkan.⁴²

Dalam beberapa hal, gaya seperti itu bisa menjadi upaya relaksasi setelah pilkada yang begitu ingar-bingar. Meskipun banyak pihak sudah memprediksi Irwandi – Nova akan menjadi pemenang dalam Pilkada Gubernur Aceh 2017, mereka menghadapi tantangan yang cukup berat terutama dari wakil gubernur petahana, Muzakkir Manaf.⁴³

42 Baru-baru ini gaya *nyeleneh* juga ditunjukkan oleh wakil gubernur terpilih DKI, Sandiaga Uno. Saat mengambil foto dengan pakaian PDUB, ia melakukan gaya seperti bangau terbang. <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/10/12/16281751/burung-bangau-pose-andalan-sandiaga-yang-menghibur>. Foto itu melahirkan respons beragam. Ada menganggapnya sebagai gaya yang menghibur. Ada yang menganggap itu sebagai sikap histeria setelah kemenangan yang seharusnya telah berhenti.

43 Meskipun secara kualitas dan kuantitas kekerasan menurun dibandingkan pilkada sebelumnya, Pilkada Aceh 2017 tetap dianggap daerah yang paling banyak

41 “Viral, Gaya Unik Tiga Pemimpin di Aceh”, *Serambi Indonesia*, 8 Juli 2017.

Situasi yang dihadapi Aceh itu seperti juga sedang menggejala di dunia disebut populisme. Populisme sesungguhnya berkembang pertama sekali pada bidang budaya. Aslinya populisme menolak politik. Politik dianggap terlalu riuh, koruptif, dan keterlibatan di dalamnya hanya membuat pengaruh ekstrem bagi lingkungan.⁴⁴

Politik populisme biasanya dilakukan ketika krisis politik terjadi dan mengandung kegawatan, sehingga diperlukan jalan pintas memperbaiki politik dengan advokasi sederhana dan bersifat langsung. Jadi populisme dilakukan oleh pemimpin untuk memberikan resep langsung kepada publik tentang langkah-langkah perbaikan politik secara instan. Gerakan populisme biasanya menolak keras representasi politik. Padahal itu merupakan bangunan sistem politik di era modern.

Pilihan menampilkan gaya populis sesungguhnya kombinasi tiga sifat yang saling kontradiktif: penipu, demokrat, dan iblis.⁴⁵ Pilihan gaya seperti yang dilakukan oleh Irwandi untuk

mendekatkan dirinya ke tengah publik yang resah dan belum optimis pada kemajuan Aceh ke depan, tapi sekaligus langkah-langkah antisipatif yang masih dirahasiakan. Bisa jadi pilihan ini adalah taktis belaka, sebagai strategi *political deception* dalam arti positif, menuju hal-hal yang lebih substansial.

Jalan populisme sering dilakukan oleh semua kelompok politik, baik kaum progresif, reaksioner, demokrat, atau otokrat.⁴⁶ Jika Irwandi yang populer pada pemerintahan pertamanya menginginkan mengulangi sejarah itu untuk kedua kalinya dengan langkah-langkah populis, tentu memiliki alasan yang cukup rasional.

Pada periode pertama ia diingat sebagai gubernur yang ceplas-ceplos, *nyeleneh*, dan juga lucu.⁴⁷ Pada periode kedua ini ia ingin mempertahankan beberapa hal termasuk sikap mengentengkan masalah dan melucu. Sikap *nyeleneh* saat ini ditunjukkan dengan membawa pesawat terbang saat menghadiri pelantikan di wilayah Aceh yang susah diakses melalui jalan darat. Ada kisah ketika ia membawa mantan wakil gubernur Muzakkir Manaf terbang dengan pesawatnya se-

melakukan kekerasan. Menurut Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi, Aceh melakukan 26 kasus pelanggaran pilkada yaitu berupa kekerasan fisik, perusakan alat peraga, penembakan, dan pelemparan granat. Berdasarkan temuan Perludem, kekerasan yang terjadi selama kampanye cenderung meningkat, yaitu 49% kasus kekerasan pada masa persiapan, dan 51% kasus terjadi pada masa kampanye. "Kekerasan selama proses Pilkada 2017, terbanyak di Aceh", *bbc.com*, 9 Februari 2017.

44 Paul Taggart, *Populism*, Buckingham : Open University Press, 2002., hlm. 3.

45 *Ibid.*, hal 10.

46 *Ibid.*, hlm. 4.

47 Beberapa sikap populisnya pada periode pertama seperti bersahur di rumah nenek miskin di daerah Aceh Besar, mengendarai sendiri mobil dinas, menghindari Patwal, duduk di bangku belakang dalam acara yang ia menjadi pejabat yang meresmikan, dan juga meminta sumbangan untuk korban bencana gempa di Mentawai Sumatera Barat dan Yogyakarta dengan turun ke jalan. Untuk kisah terakhir itu penulis sempat menjadi saksi mata dan berdialog dengannya. Kisah itu penulis tuliskan dengan judul, "Pemimpin Populis", *Serambi Indonesia*, 22 November 2010.

hingga mabuk udara.⁴⁸

Kebijakan populislainyang dilakukan Irwandi adalah membentuk tim Rencana Pembangunan Jarak Menengah (RPJM) yang berisi kelompok akademisi, aktivis LSM, dan tim sukses.⁴⁹ Pembentukan tim RPJM sebenarnya difasilitasi oleh Bappeda sebagai otak pembangunan daerah yang bekerja penyusunan fondasi pembangunan lima tahun, sebagai tim pra-RPJM sesungguhnya. Tim ini bisa disebut sebagai “tim bayangan”, yang diharapkan memberikan nutrisi gagasan pembangunan sebelum tim teknokratik pemerintah resmi bekerja.

Namun sayangnya, perjalanan tim RPJM ini tidak seperti yang diharapkan. Kinerja tim RPJM tidak mewakili representasi pikir dan lebih menjadi akomodasi kelompok-kelompok kepentingan sehingga tidak kuat gagasan yang diatur dan kurang bisa memberikan kepuasan intelektual bagi publik. Beberapa kritik dimunculkan karena hasil dari RPJM ini tidak dipublikasi kepada publik. Tim RPJM sendiri juga tidak saling berkoordinasi satu sama lain, sehingga sebagian

berkonflik dan malah mundur sebelum masa kerja selesai.⁵⁰

Hal lain yang juga terlihat *blunder* dalam pemerintahan Irwandi pada 100 hari pertama ialah kebijakan pembelian pesawat dan turnamen sepakbola. Kontroversi pembelian enam buah pesawat terbang untuk mengawal perairan Aceh dengan panjar Rp 10 miliar dan Tsunami Cup yang menghabiskan anggaran hingga Rp 11.5 miliar dianggap sebagai program hura-hura. Rencana pembelian pesawat itu telah tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada Anggaran Pendapatan Belanja Aceh-Perubahan 2017.⁵¹

Program-program ini muncul demikian saja dalam penyusunan APBA-P 2017, sehingga ditengarai ada politik bancakan dalam meloloskannya. Program-program ini terlihat tidak memiliki pijakan argumentasi yang kuat, tidak efisien, gagal fokus, dan hanya untuk menyerap anggaran yang kerap tidak maksimal di akhir tahun. Akhirnya memungkinkan terjadinya perencanaan anggaran yang tidak pro-publik.

Alasan pembelian pesawat untuk menjaga wilayah perairan Aceh dari berbagai tindakan kriminal, tidak memiliki alasan rasional. Karena jika perlu penguatan laut, tentu bukan

48 Hal itu terjadi ketika Irwandi mengendarai pesawat Eagle One miliknya setelah melakukan pelantikan Bupati Simeulu dan akan melakukan perjalanan menuju Lhokseumawe pada 21 Juli 2017. Namun di tengah perjalanan, ternyata mantan panglima GAM itu mabuk udara hingga pingsan dan harus mendaratkan pesawatnya secara darurat di Bandara Cut Nyak Dien, Nagan Raya. Pingsannya lawan politiknya saat pilkada itu sempat menjadi olok-olok di media sosial. <http://www.beritakini.co/news/terbang-dari-simeulue-muzakir-manaf-pingsan-di-pesawat-pribadi-irwandi/index.html>.

49 Banyak pihak melihat langkah ini adalah politik balas jasa bagi tim pendukung saat pilkada, terutama di kalangan akademisi yang tidak terlibat langsung dalam kampanye dan politik praksis.

50 Wawancara dengan salah seorang tim inti RPJM Aceh, 24 September 2017.

51 “Bukan Beli Pesawat, Tapi Perkuat Keamanan Laut”, *www.kba.one*, 21 September 2017.

pesawat sipil berbadan kecil yang diperlukan, melainkan armada laut dengan daya dukung persenjataan militer melalui institusi berwenang seperti Angkatan Laut dan Kepolisian Air.

Demikian pula *output* dari Tsunami Cup untuk meningkatkan nilai tawar pariwisata Aceh. Anggaran yang digunakan tidak sebanding dengan kemanfaatan yang bisa diterima dari investasi anggaran. Padahal dengan anggaran sebesar itu bisa membangun sarana dan prasarana di bidang pariwisata dan promosi potensi wisata Aceh melalui saluran media daripada sekedar event serimonial belaka.⁵²

Sesungguhnya kebijakan yang diambil Irwandi ini menunjukkan antitesis terhadap ide populisme. Jika merujuk pada gagasan yang disampaikan Ionescu dan Gellner seperti dikutip Taggart, bahwa gerakan populisme adalah bagian ideologi pro-rakyat seperti anti-urban, anti-kapitalis, antisemitisme, dll yang diabsorpsi dari konsep sosialisme, nasionalisme, dan *peasantism*.⁵³ Seharusnya tidak ada kegiatan ini di dalam kantong kebijakan pemerintahan Aceh terpilih itu.

Meskipun konsep populisme rapuh belaka, karena tidak berangkat dari sistem ideologi dan tipe organisasi politik yang terstruktur dan rapi, gerakan ini bisa dibaca sebagai pembelaan kepada

mereka. Publik bisa menarik garis mana kebijakan populis dan mana yang elitis. Namun untuk program pembelian pesawat dan turnamen kecil sepakbola itu, hanya digunakan untuk menyenangkan tim sukses yang oportunistis dan pragmatis. Dapat disimpulkan, Irwandi lemah menjaga kekuatan politiknya agar konsisten pada garis perubahan pro-rakyat.

Terakhir, ada kebijakan populis Irwandi yang menjadi bola api terkait konsep keberagaman dan perlindungan kepada minoritas, yaitu Peraturan Gubernur Aceh No. 25 tahun 2007 tentang Pendirian Rumah Ibadah. Pergub itu keluar pada masa pertama pemerintahannya. Peraturan itu merupakan *lex specialis* dari Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 tahun 2006 atau yang kemudian terkenal dengan sebutan SKB dua Menteri.

Keberadaan pergub itu melahirkan pro kontra di Aceh dan publik nasional. Di kalangan aktivis keberagaman nasional, keberadaan pergub itu membuat kelompok minoritas di Aceh tidak memiliki ruang gerak yang cukup dalam mendirikan rumah ibadah. Namun di Aceh terutama dari kelompok politik Islam konservatif, pergub itu memberikan status legitimasi bagi umat non-muslim untuk membangun rumah ibadah. Titik krusial dari keberadaan pergub itu terlihat pada konflik di Singkil pada 13 Oktober 2015.⁵⁴ Permasalahan

52 "Pembelian Pesawat dan Tsunami Cup Bukan Program Tipikal Irwandi", <http://www.ajnn.net>, 21 September 2017.

53 Taggart, *op cit.*, hlm. 15.

54 Lihat Teuku Kemal Fasya, "Identitas Terbelah, *op cit.*, hlm. 27 – 89. Salah satu tesis di dalam tulisan itu ialah

yang terjadi di Singkil akhirnya memiliki proses penyelesaian yang cukup lama. Salah satunya karena Pergub No. 25 tahun 2007 terlihat lebih memberatkan dibandingkan SKB dua Menteri.

Padahal seperti adagium hukum, *lex superior derogat legi inferiori*, bahwa hukum yang lebih tinggi akan membatalkan hukum yang lebih rendah. Dalam hal ini SKB dua Menteri seharusnya menjadi pijakan dalam penyelesaian masalah rumah ibadah dibandingkan pergub karena memberikan persyaratan lebih besar. Seperti yang diketahui, SKB dua Menteri sendiri juga sudah menjadi sengkaret sengketa di tingkat wacana nasional dan diusulkan untuk dihapus.

Isu populisme Islam ini juga melingkupi situasi di Aceh. Seperti terlihat sejak gerakan Arab Spring pada 2011, gerakan demokratisasi memang tidak cukup bisa subur di seluruh negara muslim. Sebagian besar gagal mengembangkan demokrasi dengan pelbagai hambatan yang terdapat dalam kebudayaan Arab ketika memahami “demokrasi yang terbaratkan”. Namun di beberapa negara seperti Indonesia dan Turki konsep demokrasi sudah cukup lama mengalami proses inisiasi sehingga relatif lebih diterima.

Namun, ada problem di Aceh dan belahan daerah lain di Nusantara yang kuat pengaruh Islam politiknya, seperti juga di negara Turki, yaitu demokrasi

tidak berangkat sungguh-sungguh dari nilai-nilai kultural dan intrinsik Islam. Gerakan itu mendapatkan dorongan dari ekonomi kapitalis yang “berdayung sampan” dengan politik primordialisme dalam melakukan agregasi politik. Akibatnya, muncul kontradiksi-kontradiksi kompleks dari politik globalisasi neo-liberal, antara mendorong demokrasi dan/atau politik agama. Akibatnya tak terelekkakan, konflik atas klaim otentik agama kerap terjadi, yang sebenarnya berangkat dari masalah-masalah ekonomi lokal dan sebagian bersinergi dengan kepentingan global.⁵⁵

Seperti terlihat dalam fenomena keagamaan di Aceh, aktivitas kelompok Islam politik melakukan “gerakan perlawanan” terhadap negara. Kelompok-kelompok Islam politik dan puritan itu menjadi kelompok “borjuis terpinggirkan”. Mereka sedang melakukan negosiasi terhadap elite agama yang memiliki akses terhadap sumberdaya ekonomi dan politik negara. Pilihan gerakan populisme agama dianggap lebih efektif.⁵⁶

55 Vedi R. Hadiz, *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*, Cambridge : Cambridge University Press, 2016., hlm. 15.

56 Ini terlihat misalnya dalam “gerakan pendukung Ahlul Sunnah wal Jamaah yang mengepung Mesjid Raya Baiturrahman pada 9 Juni 2015. Aksi itu sendiri difasilitasi oleh Front Pembela Islam, Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA: organisasi ulama *underbouw* PA), dan Pesantren Inshafuddin. Mereka memaksa pihak mesjid Baiturrahman melakukan tradisi azan dua kali, khutbah jumat wajib muwalat, memegang tongkat bagi khatib, khatib wajib ulama Aceh, dsb. Aksi ini membesar dengan provokasi bahwa mesjid Baiturrahman dikuasai oleh kelompok wahabiyah, padahal tuduhan itu secara riil tidak benar. Lihat <https://www.youtube.com/watch?v=QflqD0I8RLU>. Aksi ini kemudian diikuti oleh

konflik bernuansa agama di Singkil selalu muncul ketika momentum pilkada telah dekat. Jadi disimpulkan, kasus-kasus agama itu hanya dijadikan pemantik saja untuk isu politik yang lebih luas dan pragmatis.

Gerakan Islam politik ini kerap menggunakan pilihan isu *ummah* dan ahlu sunnah wal jamaah dalam melawan elite pemerintahan dan kaum agamawan yang dianggap elitis dan rakus.⁵⁷

Dalam konteks Aceh, Irwandi pada masa awal pemerintahannya berada dalam dilema. Satu sisi keluarnya pergub itu untuk menarik simpati dari kalangan Islam tradisional dan politik, tapi di sisi lain disalah-artikan karena mengeluarkan peraturan yang dianggap membuat kelompok agama minoritas memiliki justifikasi untuk pembangunan gereja. Padahal konsep otonomi khusus sebagai daerah yang memberlakukan Syariat Islam, tetap harus memberikan perlindungan peribadatan bagi kaum minoritas non-muslim.

Perjanjian damai MoU Helsinki memang kurang memberikan perhatian atas problem minoritas. Sebagian besar hanya mengatur konsep kewarganegaraan (*citizenship*) eks kombatan dan korban konflik. Padahal, ada sisi lain dari masyarakat di Aceh yang juga menjadi “korban” di era damai ini, yaitu kelompok minoritas

non-Islam yang terpapar politik Syariat Islam. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep perlindungan itu juga diakui di dalam MoU Helsinki, yaitu aturan pemberlakuan kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.⁵⁸ Dua kovenan harus disahkan dengan diakuinya MoU Helsinki, dan kemudian memang diundang-undangkan oleh pemerintah Indonesia.⁵⁹ Kovenan itu sendiri menjadi senjata yang dapat digunakan oleh kelompok minoritas untuk melindungi status *citizenship* mereka, termasuk identitas minoritas untuk menjaga diri dari agresi keyakinan kelompok mayoritas.⁶⁰

Inilah tantangan yang akan dihadapi pemerintahan Aceh terbaru. Wacana populisme yang dipakai untuk memenangkan hati para pemilihnya jangan sampai tergelincir pada pengabaian kelompok minoritas.

58 Pasal 2.1. pada bab Human Rights Perjanjian MoU Helsinki antara Pemerintah RI dan GAM pada 15 Agustus 2017. “*GoI will adhere to the United Nations International Covenants on Civil and Political Rights and Economic, Social, dan Cultural Rights*”.

59 UU No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, dan Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) dan UU No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Masalah kebebasan beragama dan berkeyakinan, termasuk mendirikan rumah ibadah masuk ke dalam pasal hak-hak sipil. Adapun tentang pewarisan nilai-nilai budaya-keagamaan menjadi bagian dari hak-hak budaya sebuah masyarakat yang harus dipreservasi dan diproteksi gangguan yang bisa membuatnya punah atau rusak.

60 Thomas W. Simon, *Ethnic Identity and Minority Protection : Designation, Discrimination, and Brutalization*, Maryland : Lexington Books, 2012., hlm. 93.

aksi massa yang lebih besar di Makam Syekh Abdurrauf As-Singkily atau Syiah Kuala di Banda Aceh pada 1 Oktober 2015. Dalam yel-yel yang digunakan di dalam spanduk muncul kecaman terhadap wahabi, komunisme, Ahmadiyah, dan Syiah. Aksi ini sesungguhnya aksi politik yang didukung Partai Aceh (PA) untuk memperbesar dukungan kepada Muzakkir Manaf dalam kandidasi Pilkada 2017. Terlihat pada settingan aksi di makam Syiah Kuala muncul yel-yel hidup Muzakkir Manaf sebagai “Umar Bin Khattab”. Lihat berita, “Ini Dia ‘Umar bin Khattab’ Akhir Zaman”, *Serambi Indonesia*, 2 Oktober 2015. Kini isu aswaja tidak lagi muncul setelah pilkada usai.

57 Vedi R. Hadiz, *op cit.*, hlm. 16.

Bukan hanya minoritas non-muslim, tapi juga minoritas mazhab di dalam Islam. Untuk saat ini yang menderita bukan hanya Syiah dan Ahmadiyah, tapi Muhammadiyah dan kelompok tarekat (tasawuf).⁶¹

Epilog

Pilkada ketiga yang terjadi di era perdamaian Aceh ini menjadi tantangan tersendiri. Salah satunya memutuskan mata rantai konflik menuju demokrasi yang terkonsolidasi.

Pilihan ini tentu tidak bisa cepat diselesaikan terkait karena bangunan perdamaian (*peace building*) yang tidak dikonstruksi sejak benar sejak awal. Yang bisa dianggap penyebabnya ialah tidak berjalannya proyek rekonsiliasi.

UU Pemerintahan Aceh (UU No. 11 tahun 2006) telah mensyaratkan bahwa salah satu kerangka perdamaian Aceh harus dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk Aceh. Hal itu termaktub di dalam pasal 229 dan 230 UU No. 11 tahun 2006. Di antara bunyi pasal pentingnya ialah KKR Aceh merupakan bagian dari KKR nasional (pasal 229 ayat (2)).

Namun bukan solusi, malah masalah terlihat. Penyebabnya KKR nasional belum eksis dan undang-undangnya (UU No. 27 tahun 2004) telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 7 Desember 2006 atau beberapa bulan setelah UU Pemerintah Aceh disahkan. Dua hal

ini memang memiliki garis sejarah masing-masing, tapi konteks hukumnya berhubungan. Belum lagi problem lokal di Aceh ketika qanun KKR sendiri sangat lambat disahkan oleh DPR Aceh yang notabene dikuasai PA. Baru pada akhir tahun 2013, qanun KKR disahkan, yaitu Qanun No. 17 tahun 2013. Adapun komisioner KKR Aceh baru dibentuk tiga tahun kemudian.⁶²

Namun alih-alih menjadi obat, KKR Aceh sendiri dirundung masalah internal dan eksternal. Masalah eksternal terkait daya dukung dari pemerintah, yaitu pembiayaan yang terus macet. Masalah internal terlihat dari visi komisioner KKR Aceh yang belum kuat melihat problem luka masa lalu Aceh. Tim KKR Aceh yang terpilih oleh DPRA pun tidak solid. Salah satu wujud tidak solidnya adalah keluarnya salah seorang komisioner KKR dan kemudian masuk dalam partai politik pendukung Irwandi, PNA. Kini ia diangkat menjadi staf khusus gubernur bidang politik dan keamanan.⁶³

Maksud rekonsiliasi Aceh bukan sekadar pembentukan KKR Aceh atau

61 Teuku Kemal Fasya, "Pertikaian Mazhab dan Nasib Islam Toleran", www.satuharapan.com, 9 Juli 2015.

62 Teuku Kemal Fasya, "KKR Aceh Sisi Lain Luka", *Kompas*, 27 Juli 2016.

63 "Muhammad MTA Diangkat Sebagai Penasihat Khusus Gubernur Aceh, Ini Bidangnya", *Serambinews.com*, 14 Oktober 2017. Irwandi sendiri tidak cukup fokus mendukung ide rekonsiliasi Aceh. Ia akan memfokuskan pada pengembangan konsep kesejahteraan Aceh – yang diberi nama JKA plus, dan akan menunda program-program yang berhubungan dengan KKR dan pengungkapan kejahatan masa lalu. Informasi ini sebagaimana disampaikan salah seorang tim RPJM Aceh, Norma Manalu kepada penulis, 2 September 2017. Norma adalah peserta cadangan komisioner KKR Aceh yang kemungkinan akan menggantikan MTA.

pekerjaan yang berhubungan dengan pengungkapan kebenaran, tapi lebih luas dari itu. Konsep rekonsiliasi yang dimaksudkan di sini lebih komprehensif pada aspek psikologi politik dan filosofis-kultural. Konsep rekonsiliasi itu - seperti dimaksudkan oleh Jacques Derrida, yaitu bekerja proyek perdamaian atas setiap konflik yang terjadi di masa lalu tanpa batas.⁶⁴

Konsep rekonsiliasi seharusnya dikerjakan pertama sekali ketika perdamaian dilakukan, dan tidak terbatas pada ukuran dan terminologi hukum keadilan transisional. Karena seperti terlihat dalam sejarah GAM, problem yang paling besar ternyata bukan dari pihak luar tapi dari dalam. Dimulai dari sejarah keterpecahan dengan Husaini Hasan hingga pada pilkada terakhir, dimana banyak pimpinan eks kombatan yang dulunya bersatu-padu kini berpisah jalan dan tak saling sapa.⁶⁵

Pekerjaan inilah yang harus dilakukan demi menyelamatkan perdamaian Aceh dari perdamaian berwajah oportunistik yang diperankan oleh pelaku-pelaku perdamaian pada masa-masa awal

termasuk dalam pemerintahan. Frasa ini disebutkan oleh Olle Tornquist sebagai “perdamaian berorientasi laba” (*profitable peace*).⁶⁶ Kini diperlukan perdamaian yang lebih otentik, yaitu mengarah kepada demokrasi yang substansial.

Makanya akar masalah di Aceh berasal dari kultur konflik yang telah mendarah-daging, yaitu munculnya perasaan bermusuhan, ketakutan, prasangka, dan stereotipe negatif.⁶⁷ Hal itu harus didekonstruksi. Rekonsiliasi baru bisa dijalankan jika penyakit sosial-kultural itu dibenahi terlebih dahulu. Ini ditambah kurangnya kapasitas dan kekuatan moral (*moral force*) yang tokoh-tokoh perdamaian lokal di Aceh, sehingga praktik korupsi, oligarki, manipulasi, dan militeristik terus berlanjut. Ini pula yang menipiskan harapan publik atas keberadaan politikus yang bernaung dibawah PA, termasuk di parlemen.⁶⁸

Salah satu pendekatan yang sudah mulai ditinggalkan karena tergantung

66 Tornquist, *op cit.*, hlm. 32.

67 Leena Avonius, “Reconciliation and Human Rights in Post-Conflict Aceh”, of Birgit Brauchler(ed), *Reconciling Indonesia*, New York : Routledge, 2009., hlm. 123.

68 Kasus terbaru adalah pencabutan dua pasal di dalam UU PA sebagai wujud kehadiran UU Pemilu terbaru (UU No. 7 tahun 2017). Pencabutan pasal 57 dan 60 ayat 1, 2, dan 4 telah melahirkan kemarahan publik Aceh dan menuduh DPRPA tidak bekerja serius mengawal UU PA. Anggota DPRPA membantah bahwa mereka tidak pernah diajak konsultasi saat pembahasan UU Pemilu itu. Namun pengakuan anggota DPRPA itu terbantahkan saat sidang di MK, ketika Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo mengatakan DPRPA telah diikutsertakan dalam rapat-rapat pembahasan oleh Pemerintah R.I., dalam hal ini oleh Kementerian Dalam Negeri. Sontak pengakuan Tjahyo Kumolo ini melahirkan reaksi dari anggota DPRPA. “Polemik Konsultasi Pengesahan UU Pemilu”, *Pikiran Merdeka*, 5 Oktober 2017.

64 Jacques Derrida, *Cosmopolitanism and Forgiveness*, London : Routledge, 2001., hlm. 27.

65 Di antaranya adalah bupati Bireun periode 2012-2017 dari PA, pada Pilkada 2017 tidak didukung oleh PA pada Pilkada 2017 sehingga memilih maju dari jalur independen. Demikian pula tokoh senior PA di Pidie, Roni Ahmad atau dikenal sebagai Abuchiek adalah tokoh yang lebih populer dibandingkan Sarjani Abdullah, Bupati Pidie periode 2012-2017. Ia akhirnya maju melalui jalur independen pada Pilkada 2017 dan menang. Salah satu simbol kampanyenya adalah kopiah merah. Yang paling fenomenal tentu saja permusuhan antara GAM senior Zaini Abdullah dan Zakaria Saman dengan GAM junior Muzakkir Manaf, yang berpuncak pada berpisah dukungan pada Pilkada 2017.

kepada mekanisme penyelesaian perselisihan dan konflik adalah adat. Jika merujuk model terbaru mekanisme penyelesaian konflik di Timor Leste dan Rwanda, pendekatan kultural juga digunakan untuk memperkaya dan merevisi pendekatan hukum formal dalam menyelesaikan konflik. Di Aceh sendiri mekanisme adat penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan *peusijuek*.⁶⁹ *Pesijuek* ialah sebuah ritual setelah mekanisme penyelesaian di atas panggung dilakukan. *Peusijuek* atau dalam tradisi Melayu disebut tepung tawar dilakukan untuk mengembalikan harmoni sosial di kalangan pihak berkonflik agar mereka bersedia melupakan gangguan konflik yang mendera kehidupan politik.

Peusijuek sebenarnya juga dilakukan ketika para eks kombatan diberikan amnesti oleh pemerintah, yang menjadi penanda bahwa kesialan dan kesedihan pada masa konflik tidak berlanjut saat masa damai.⁷⁰ *Pesijuek* juga dilakukan ketika ada konflik pascadamai yang melibatkan pihak eks kombatan. Pemimpin komunitas mereka biasanya mendengarkan semua komplain dan kronologi terkait konflik, kemudian memutuskan penyelesaian yang paling melegakan. Setelah keputusan diterima praktik *peusijuek* dilakukan. Pendekatan-pendekatan kultural ini bisa makin mengharmoniskan situasi di Aceh, apalagi luka-luka pilkada belum kering

semua. Meskipun demikian, mekanisme ini tidak bisa digunakan serta-merta untuk penyelesaian kejahatan berat kemanusiaan (*crime against humanity*). *Pesijuek* hanya bisa dilakukan ketika penyelesaian masalah secara bermartabat telah diambil dan tidak meninggalkan duka-cita di pihak yang merasa dirugikan..

Terakhir, pemerintahan Irwandi – Nova ini memiliki pekerjaan yang juga cukup penting terkait dengan pengelolaan politik Syariat Islam yang lebih berperspektif HAM, adat, dan pluralisme. Program ini tentu bertemu pandang dengan wacana pembangunan Aceh sejahtera untuk semua, termasuk advokasi dan kebijakan afirmatif kepada kelompok minoritas, baik secara kultural, etnik, dan agama. Pilihan ini tentu saja agar tidak terbuka konflik baru di kalangan masyarakat Aceh yang sedang menyambut situasi Aceh yang semakin damai, sejahtera, dan harmoni dalam pembangunan.

Referensi :

Aceh Trend, 5 Agustus 2016.

Bowen, John W., *Islam, Law, dan Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*, Cambridge : Cambridge University Press, 2003.

Brauchler Birgit, (ed), *Reconciling Indonesia*, New York : Routledge, 2009.

Chatterjee, Partha, *The Politics of the Governed : Reflections on Popular Politics in Most of the World*, New York : Columbia University Press, 2004.

69 Leena Avonius, *op cit.*, hlm. 125.

70 *Ibid.*

Derrida, Jacques, *Cosmopolitanism and Forgiveness*, London : Routledge, 2001.

Fasya, Teuku Kemal, “Debat tanpa Hati dan Kedalaman Pikir”, *Serambi Indonesia*, 27 Desember 2016.

Fasya, Teuku Kemal, “Hasan di Tiro and the Price of Freedom for Aceh”, *The Jakarta Post*, 11 Juni 2010.

Fasya, Teuku Kemal, “KKR Aceh Sisi Lain Luka”, *Kompas*, 27 Juli 2016.

Fasya, Teuku Kemal, “Mengenang Hasan Tiro”, *Koran Sindo*, 5 Juni 2010.

Fasya, Teuku Kemal, “Pemimpin Populis”, *Serambi Indonesia*, 22 November 2010.

Fasya, Teuku Kemal, “Pertikaian Mazhab dan Nasib Islam Toleran”, *www.satuharapan.com*, 9 Juli 2015.

Fasya, Teuku Kemal, “Pilkada Aceh dan Harapan Perubahan”, *Serambi Indonesia*, 23 Februari 2017.

Fasya, Teuku Kemal, “Rapid Assessment, “Krisis Pilkada Aceh dan Analisis Keberlanjutan Demokrasi dan Perdamaian”, 12 Januari 2012, Kemitraan

Fasya, Teuku Kemal, “Sesat Pikir Mante”, *Kompas*, 13 Mei 2017.

Hadiz, Vedi R., *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*, Cambridge : Cambridge University Press, 2016.

Hamzah, Murizal, Hasan Tiro : Jalan Panjang Menuju Damai Aceh, Banda Aceh : Bandar Publishing, 2014

Hasan, Husaini M., *Dari Rimba Aceh ke Stockholm*, Jakarta : Batavia Publishing, 2015.

<http://www.ajnn.net>, 21 September

2017.

<http://www.beritakini.co/news/terbang-dari-simeulue-muzakir-manaf-pingsan-di-pesawat-pribadi-irwandi/index.html>.

<https://www.youtube.com/watch?v=QfIqD0I8RLU>.

Hurgronje, Snouck, *Tanah Gayo dan Penduduknya*, Jakarta : INIS, 1996.

Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR), *Chega! Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste*, Jakarta : KPG, 2010.

Lemke, Thomas, “Foucault, Governmentality, and Critique”, in *the Rethinking Marxism Conference*, University of Amherst (MA), 21-24 September 2000.

Al Mubarak, Taufik, “Pilkada Aceh 2017 : Kembalinya Propagandis GAM ke Singgasana”, *tirto.co*, 23 Februari 2017.

Serambi Indonesia, 2 Oktober 2015.

Serambi Indonesia, 21 Juni 2017.

Serambi Indonesia, 24 Februari 2017.

Serambi Indonesia, 8 Juli 2017.

Simon, Thomas W., *Ethnic Identity and Minority Protection : Designation, Discrimination, and Brutalization*, Maryland : Lexington Books, 2012.

Suaedy, Ahmad, (ed), *Intoleransi, Revitalisasi Tradisi, dan Tantangan Kebinekaan Indonesia*, Depok : AWC-UI, 2017.

Tornquist, Olle, et al (ed), *Aceh : Peran Demokrasi bagi Perdamaian dan Rekonstruksi*, Yogyakarta : PCD Press,

2011.

Waspada, 25 Januari 2011.

www.detik.com, 11 April 2012.

www.kba.one, 21 September 2017.

www.kompas.com, 12 Maret 2017.

www.kompas.com, 25 Februari

2017.

www.serambinews.com, 14 Oktober

2017

www.sinarharapan.co, 20 Maret

2014.

www.tempo.co, 22 Agustus 2016.

www.tribunenews.com, 20

September 2013.